BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing sebagai suatu proses yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang mengenai dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:9).

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan Negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan Negara (Hery, 2017:2).

BPK memiliki peran aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Peran aktif tersebut dituangkan dalam rencana strategis yang salah satunya adalah untuk mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional dalam semua aspek tugasnya untuk menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara (SPKN,2017).

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kode Etik Profesi dan Pernyataan Standar Audit menekankan sekali pentingnya independensi karena independensi merupakan dasar dari prinsip objektivitas dan integritas. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2017) indenpendensi merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Independensi sangat penting bagi auditor, tetapi juga harus memiliki profesionalisme tinggi dalam melakukan audit. Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjadi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (Mulyadi, 2014:40). Penelitian mengenai profesionalisme pernah dilakukan sebelumnya. Endang (2015) menyatakan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit auditor akan semakin mambaik jika semakin tinggi tingkat profesionalismenya.

Integritas auditor juga merupakan sebagai suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Dalam SPKN 2017 menyatakan integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras serta kompetensi yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2012), bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Begitu juga hasil penelitian Mutiara, Fefri dan Lovelly (2014), bahwa integritas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh auditor saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil audit.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Endang, 2015). Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Dalam sektor publik, *Government Accountability Office (GAO)*, mendefinisikan Kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Karima, 2012). Pada penelitian Yuli dan Widanaputra (2016) menemukan hasil bahwa kompetensi dan independensi

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih dan Nadirsyah (2017) yang memperlihatkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian ini berbeda diungkap oleh Febriyanti (2014) menunjukkan independensi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian Elen dan Mayangsari (2013) menunjukkan kompetensi dan profesionalisme tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Masalah mengenai profesi auditor semakin banyak bermunculan. masalah terpusat beberapa hal terkait kinerja dan profesionalisme auditor sektor publik (Bastian, 2014:31). Fenomena kompetensi auditor BPK saat ini tengah menjadi perhatian dimasyarakat. Kasus kegagalan hasil audit forensik BPK atas kasus dana talangan Bank Century. Pasalnya, BPK mempekerjakan auditor yang tidak kompeten di bidangnya auditor yang dipilih tidak memiliki sertifikat *CFE* (*Certified Fraud Examiner*). Hal tersebut merupakan tindakan yang mengecewakan sehingga membuat citra BPK dipertaruhkan kompetensinya dengan kepentingan BPK yang terkooptasi (Sindonews.com, 2011). Fenomena independensi dan integritas auditor BPK saat ini tengah menjadi perhatian dimasyarakat. Kasus suap terhadap auditor BPK RI terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDDT tahun anggaran 2016 merupakan tindakan yang tidak etis sehingga membuat auditor BPK diragukan independensi dan integritasnya. Sedangkan fenomena mengenai profesionalisme yaitu pada TEMPO.CO memberitakan, Indonesia Audit Watch melaporkan Ketua Tim Auditor Bank Century Hasan Bisri

dan penanggung jawab audit Bank Century, ke Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri. Indonesia Audit *Watch* menuding keduanya menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Indonesia Audit *Watch* menduga BPK telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 UU No.15 tahun 2006 tentang BPK. Ketua tim auditor Bank Century dan penanggung jawab audit Bank Century maupun BPK sebagai lembaga telah memberikan keterangan palsu dan melampaui wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengaudit Bank Century. Indonesia Audit *Watch* menyatakan ada setidaknya enam dari Sembilan temuan audit investigasi BPK yang terkait kasus Bank Century itu diduga tidak Valid. Audit *Watch* menyimpulkan ada pola yang tidak sinkron antara pengaudit dan yang diaudit (Wibowo, 2010).

Melihat fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor BPK juga masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kualitas audit.

Kasus-kasus yang banyak terjadi dan melibatkan auditor BPK tidak hanya berdampak terhadap BPK RI yang tersandung kasus tersebut saja namun juga akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kualitas audit yang berada di BPK RI perwakilan wilayah lain termasuk BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji kembali **Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Integritas auditor terhadap Kualitas Audit.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Akibat kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan auditor aparat pemeriksa melalui sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) yang menyebabkan kompetensi auditor kurang maksimal.
2. Sikap independensi auditor masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kualitas audit.
3. Profesionalisme auditor BPK juga masih lemah, karena auditor telah melanggar komitmen profesi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keterangan palsu sehingga akan berpengaruh nantinya terhadap kualitas audit.
4. Sikap integritas auditor masih rendah, karena kejujuran auditor masih dipengaruhi oleh pihak lain sehingga akan berdampak pada kualitas audit.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini supaya lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu ditetapkan batasan-batasan

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit diukur dari kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor.
2. Objek penelitian adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dimana sumber data berasal dari auditor yang bekerja di kantor BPK. RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimanakah pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimanakah pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau?
4. Bagaimanakah pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau?
5. Bagaimanakah pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pengaruh Independensi auditor terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pengaruh secara bersama-sama kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor, maupun teori-teori berkaitan dengan kualitas audit.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPK RI Perwakilan Kepri

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dan data atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan dimasa yang akan datang bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari aparat pemerintah. bagaimana kualitas audit yang telah dilakukan BPK selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan uang Negara sehingga nanti akan berdampak pada kemajuan daerah yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat wilayah Kepulauan Riau.

4. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.